

**KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM  
DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Oleh  
**Ischika Aprilia Ivana**  
**NIM. 2005040009**

**ABSTRAK**

Dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi saat ini yang terjadi di wilayah kawasan khusus yang dikenal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menghasilkan produk regulasi yaitu Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam yang beririsan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam. Implikasi dari hadirnya obesitas regulasi di Kota Batam yang sama-sama memiliki kesamaan kewenangan sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam baik dari aspek perizinan, perdagangan, pertanahan dan aspek lainnya. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) mencakup eksistensi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan hadirnya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam di luar dari yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1), namun diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk atas dasar kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kedudukan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Batam dapat berfungsi sebagai referensi untuk Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam terutama dalam hal-hal yang bersifat umum. Sehingga, Kedudukan Peraturan Daerah Kota Batam lebih tinggi karena ruang lingkup materinya yang umum dan universal. Namun, dalam konteks yang lebih khusus berlakunya prinsip *lex specialis derogat legi generali*, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam mampu mengatur aspek yang berbeda dari ketentuan umum yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Batam.

Kata Kunci: Kedudukan, Hierarki, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

**THE POSITION OF THE REGULATION OF THE HEAD OF THE BATAM  
CONCESSION AGENCY IN THE HIERARCHY OF INDONESIAN LAWS  
AND REGULATIONS BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2011  
CONCERNING THE FORMATION OF LAWS AND REGULATIONS**

**By**  
**Ischika Aprilia Ivana**  
**NIM. 2005040009**

**ABSTRACT**

*In fulfilling the needs of the implementation of government and society, an orderly order is needed in the field of legislation formation. The current condition in the special area known as the Free Trade Zone and Free Port of Batam produces a regulation product, namely the Regulation of the Head of the Batam Concession Agency which overlaps with the Local Regulation of Batam City. The implication of the presence of obesity regulation in Batam City, which both have the same authority, is that there is often overlapping authority between Batam Concession Agency and Batam City Government in terms of licensing, trade, land and other aspects. Referring to Article 7 paragraph (1), it covers the existence of Regency/City Regional Regulations, while the presence of the Regulation of the Head of the Batam Concession Agency is outside of what is stated in Article 7 paragraph (1), but its existence is recognized and has binding legal force as long as it is ordered by higher laws and regulations or formed on the basis of authority as stated in Article 8 paragraph (2) of Law Number 12/2011 on the Formation of Legislation. Thus, the purpose of this research is to determine the position of the Head Regulation of the Batam Concession Agency in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. This research uses descriptive juridical-normative method with statute approach. The result of this research shows that the Local Regulation of Batam City can serve as a reference for the Regulation of the Head of Batam Concession Agency, especially in general matters. Thus, the position of Local Regulation of Batam City is higher due to its general and universal scope of material. However, in a more specific context where the principle of *lex specialis derogat legi generali* applies, the Regulation of the Head of Batam Concession Agency is able to regulate different aspects from the general provisions regulated by the Local Regulation of Batam City.*

*Keywords: Position, Hierarchy, Regulation of the Head of Batam Concession Agency.*